

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Hubungan Masyarakat

1. Pengertian Manajemen Hubungan Masyarakat

Istilah Manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno dengan kata *Management*, yang mempunyai arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut seorang pakar Mary Parker Follet, manajemen berperan sebagai seni untuk menyelesaikan suatu pekerjaan lewat orang lain. Definisi tersebut menunjukkan bahwa seorang manajer mempunyai tugas mengarahkan dan mengatur seseorang untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Ricky W. Griffin mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses pengorganisasian, pengkoordinasian, perencanaan, dan pengontrolan sumber daya agar dapat mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efisien ialah dimana sebuah tugas yang telah dilaksanakan secara terorganisasi, benar dan sesuai dengan *schedule*, sementara efektif sendiri berarti sebuah tujuan mampu dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹ Menurut Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses yang memiliki fungsi *planning*, *organizing*, *commanding*, *coordinating*, dan *controlling*, terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²

¹ Muhfizar, dkk., *Pengantar Manajemen*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hal. 37-38

² Erwin Firdaus, dkk., *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Penulis, 2021), hal. 4

Jadi manajemen adalah ilmu dan sekaligus seni, yang mempengaruhi sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai tujuannya, harus melakukan usaha-usaha melalui proses *planning*, *organizing*, *actuating*, *commediting*, *coordinating*, dan *controlling*.

Public berasal dari bahasa Inggris bermakna “Masyarakat”, adapun *Relation* secara bahasa Inggris berarti “Hubungan”. Menurut Griswold dikutip dalam buku Maskur yang berjudul Manajemen Humas Pendidikan Islam, *Public Relations* merupakan fungsi umum, biasanya digunakan mengenai hal penting seperti pada aktivitas setiap urusan manusia, agama, pendidikan, pemerintah, sosial, dan kesejahteraan kewarganegaraan. Praktik humas adalah seni sosial, guna meneliti perjalanan, meramalkan konsekuensi, menasihati para pemimpin organisasi, implementasi rencana program dengan melayani keduanya yaitu organisasi dan kepentingan publik.³ Majelis Humas Dunia (*World Assembly of Public Relations*) dikutip dalam buku Morissan yang berjudul Manajemen *Public Relations*, Humas adalah seni dan ilmu sosial dalam menganalisis kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memberikan saran kepada pimpinan serta melaksanakan program tindakan terencana yang melayani baik kepentingan organisasi dan khalayaknya.⁴

³Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hal.13-14

⁴ Morissan, *Manajemen Public Relations*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 8

Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Public Relations* (PR) adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan pihak masyarakat. Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Public Relations* (PR) adalah sebuah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling mengerti, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi, sekaligus membangun citra positif lembaga. Sebagai profesi seorang Humas bertanggungjawab sebagai mediator informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi.⁵

Manajemen Humas dalam lembaga pendidikan merupakan mediator yang menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat demi tercapainya tujuan organisasi dan harapan masyarakat dengan produk yang dihasilkan. Berdasarkan suatu tugas tersebut seorang humas dituntut untuk mampu menjembatani keterlibatan seluruh anggota masyarakat sekolah, guru, staff, siswa, orang tua, lingkungan, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, lembaga perusahaan dll, untuk ikut peduli dalam mengoptimalkan kemampuan dan kerja sama sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan membantu kepala sekolah dalam kegiatan pengelolaan sekolah.⁶

⁵Abdul Rahmat, *Manajemen Humas....*, hal. 12

⁶ Hannah Mahfushah dan Anshari, *Media Publik Humas Dalam Pendidikan*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Tanzim, Volum 2 Nomor 2, 2018, hal. 137-138

Beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen humas adalah pengaturan tentang hubungan masyarakat, berkaitan dengan citra lembaga pendidikan, agar *Image* dan kualitas tetap mendapat perhatian masyarakat, bahkan mengalami perubahan dan perkembangan.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen Hubungan Masyarakat

Fungsi pokok manajemen hubungan masyarakat atau tahapan-tahapan dalam manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penggarakan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan dalam konteks kegiatan di lembaga pendidikan.⁷

a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan sebagai fungsi manajemen dilakukan pada tahap pertama sebelum melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan. Perencanaan merupakan upaya untuk menentukan program kegiatan yang ingin dilakukan serta bagaimana cara mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sebagai suatu proses mempersiapkan sesuatu yang akan dilakukan untuk selanjutnya meraih tujuan yang telah disepakati.⁸

Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa jumlah biaya. Perencanaan menurut Gibson

⁷ Eka Khoiru Nisa dan Danas Hasman Nugraha, *Implementasi Manajemen Humas Dalam Meningkatkan Hubungan Baik Antara Sekolah Dengan Wali Siswa di SD IT Harapan Bunda Semarang Jawa Tengah*, Jurnal Al-Fahim, Vol. 1 No. 1, Maret 2019, hal. 5

⁸ Abdul Hadi, *Perkembangan Dan Konsep Dasar Manajemen Humas Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Histori*, Jurnal At-Ta'lim Volume 4, Nomor 2, Juni 2018, hal. 6

mencakup kegiatan menentukan sasaran dan alat sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pada fungsi manajemen humas di lembaga pendidikan merupakan kesepakatan dan pengertian antara personil lembaga pendidikan tentang apa yang harus dicapai organisasi.⁹

b. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama di lembaga pendidikan. Fungsi pengorganisasian bertujuan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip manajemen lembaga pendidikan. Fungsi pengorganisasian meliputi: pembagian tugas kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan, serta menetapkan wewenang dan tanggungjawab, sistem komunikasi, serta mengkoordinasi kerja setiap karyawan di dalam suatu tim kerja yang solid dan terorganisir.¹⁰

Adapun prinsip-prinsip pengorganisasian menurut Purwanto yang dikutip dalam buku Hikmat yang berjudul Manajemen Pendidikan, meliputi:

- 1) Memiliki tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang sudah pasti, maka pengorganisasian diarahkan kepada tujuan yang dimaksudkan.

⁹Eka Khoiru Nisa dan Danas Hasman Nugraha, *Implementasi Manajemen....*, hal. 5

¹⁰ Eferi, *Manajemen Bidang Hubungan Masyarakat Untuk Meningkatkan Citra SMA*, Jurnal Manajer Pendidikan, Volum 9, Nomor 6, November 2015, hal. 789

- 2) Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran.
- 3) Ada keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab.
- 4) Pembagian tugas sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis dan kooperatif.
- 5) Pemahaman mendalam tentang pola organisasi pendidikan, dengan susunan struktur organisasi yang sederhana, sesuai dengan kebutuhan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian.
- 6) Ada jaminan keamanan bagi anggota dalam bekerja (*security of tenure*).
- 7) Ada tanggungjawab serta tata kerja yang jelas dalam struktur organisasi.¹¹

c. Fungsi Penggerakan

Penggerakkan dalam hal ini merangsang anggota-anggota organisasi melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. menurut Devis penggerakan adalah kemampuan pemimpin membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Jadi, pemimpin lembaga pendidikan disini menggerakkan dengan semangat, pengikut juga bekerja dengan semangat.¹²

d. Fungsi Pengkoordinasian

¹¹ Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 103-104

¹²Eka Khoiru Nisa dan Danas Hasman Nugraha, *Implementasi Manajemen....*, hal. 6

Pengkoordinasian berarti menjaga agar masing-masing tugas yang telah diberi wewenang dan tanggungjawab dikerjakan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan. Pengkoordinasian menurut The Liang Gie dikutip dalam buku Sarlena dan Mardalena yang berjudul Pengantar Manajemen, mengemukakan pengkoordinasian adalah rangkaian aktivitas menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan, percekocokan, kekembaran kerja atau kekosongan kerja.¹³

Pengkoordinasian pada lembaga pendidikan adalah mempersatukan rangkaian aktivitas penyelenggaraan di lembaga pendidikan dan pembelajaran orang-orang dan pekerjaannya sehingga semua berlangsung secara tertib kearah tercapainya maksud yang telah ditetapkan.

e. Fungsi Pengarahan

Pengarahan ini dimaksudkan agar semua unsur yang terlibat dalam kegiatan sekalipun berbeda tugas dan tanggungjawabnya, dapat melaksanakan tugas yang diembannya secara bersama-sama dalam mencapai tujuan yang sama. Selian itu, fungsi pengarahan dimaksudkan pula agar setiap bagian secara sektoral atau berbeda interpretasi atas semua ketentuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan sebelumnya juga pengawasan dilakukan agar kegiatan

¹³ Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 69

yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan.

Koontz dan O'Donnel mengemukakan pengarahan (*directing*) sebagai fungsi terpenting dalam menggerakkan bawahan. Nawawi mengemukakan bahwa pengarahan (*directing*) adalah memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap persoal baik secara struktur maupun fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan.¹⁴

Menurut Sagala kegiatan pengarahan, antara lain:

- 1) Memberikan petunjuk dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- 2) Memberikan dan menjelaskan tugas.
- 3) Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan kepada pengawai agar dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas.
- 4) Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran.
- 5) Memberikan koreksi agar setiap personil melaksanakan tugas-tugas secara efisien.¹⁵

f. Fungsi Pengawasan/Monitoring dan evaluasi

Menurut Chuck Williams dikutip dalam buku Sri Marmoah yang berjudul *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Teori Dan Praktik* mendefinisikan pengawasan sebagai "*controlling is*

¹⁴ Sri Marmoah, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hal. 105

¹⁵Eka Khoiru Nisa dan Danas Hasman Nugraha, *Implementasi Manajemen....*, hal. 6

manitoring progress toward goal achievement and taking corrective action when progress isn't being made” (pengawasan adalah peninjauan kemauan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud).¹⁶

Pengawasan/Monitoring bertujuan untuk menjaga agar kebijakan yang diterapkan dalam sebuah lembaga/organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan dan dapat menemukan kesalahan sekecil mungkin hingga tidak ada risiko yang lebih besar lagi. Monitoring juga bertujuan untuk memodifikasi dan mengubah system kebijakan jika dirasa hasil monitoring membutuhkan perubahan tersebut.

Selian monitoring juga diperlukan evaluasi, evaluasi ialah proses yang dilakukan untuk menilai bagaimana sebuah program *Public Ralation* yang sudah disusun telah dikelola dengan efektif. Evaluasi ini akan melihat apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan panduan yang direncanakan atau tidak. Sedangkan evaluasi hasil menilai efek apa yang didapatkan dari pelaksanaan program humas, apakah sudah memenuhi tujuan atau belum. Penilaian atau evaluasi merupakan penentian derajat kualitas berdasarkan indikator yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pekerjaan.

Evaluasi bertujuan untuk menentukan tingkat kerja dalam suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi dalam kebijakan.

¹⁶Sri Marmoah, *Administrasi Dan Supervisi....*, hal. 101

Mengukur kualitas output dari suatu kebijakan, mengukur dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui jika terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan dari cara mengadakan perbandingan tujuan, sasaran dengan target yang sudah tercapai. Evaluasi input bagi tahapan kebijakan untuk kedepannya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya. Evaluasi merupakan penyediaan informasi yang bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk membuat keputusan.¹⁷

3. Peran Manajemen Hubungan Masyarakat

Humas dalam sebuah lembaga pendidikan berperan untuk memasarkan dan membangun *Image* yang baik, agar masyarakat mampu percaya pada lembaga pendidikan tersebut. Selain itu humas dalam lembaga pendidikan juga berperan untuk membina dan mengelola hubungan yang baik dengan publik internal seperti warga sekolah karena hubungan yang baik dalam publik internal sangat dibutuhkan untuk membangun dan menjaga lembaga itu sendiri. Selain dengan publik internal, humas dalam lembaga pendidikan juga berperan untuk membina dan menjaga hubungan yang baik dengan publik eksternal yaitu orang tua siswa, masyarakat, mitra kerja, antar sekolah, instansi pemerintah dll. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat humas harus mampu menjaga hubungan baik tersebut.

¹⁷Abdul Hadi, *Perkembangan Dan Konsep....*, hal. 8-9

Humas juga harus mampu mendengar keinginan dan opini masyarakat.¹⁸

Peranan Hubungan masyarakat di lembaga pendidikan ke depan antara lain:

- a. Membina hubungan harmonis kepada publik internal (dalam lingkungan lembaga pendidikan, seperti: dosen/guru, tenaga administrasi, dan siswa) dan hubungan kepada publik eksternal (diluar lembaga pendidikan, seperti: orang tua siswa, masyarakat, mitra kerja, antar sekolah, instansi pemerintah dll).
- b. Membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan publik eksternal, dengan menyebar pesan, informasi, dan publikasi hasil penelitian dan berbagai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pimpinan.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan yang terjadi, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat.
- d. Berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat.
- e. Bersikap terampil dalam menterjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan baik.¹⁹

4. Fungsi dan Tujuan Manajemen Hubungan Masyarakat

¹⁸ Zakirun Pohan, *Peran Humas Publik Relations Pada Bidang Pendidikan*, Jurnal Sintesa Volum. 18 Nomor. 1, 2018, hal. 106

¹⁹ Wina Puspita Sari dan Asep Soegiarto, *Fungsi dan Peran Humas di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Communicology, Volum. 7 Nomor. 1 Juli 2019, hal. 55

Fungsi hubungan masyarakat menurut Irving Smith Kogan dalam artikel *Public Relations* mengatakan bahwa fungsi pokok humas antara lain adalah fungsi manajemen sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat, meyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat.²⁰

Fungsi hubungan masyarakat dalam bidang pendidikan tidak jauh berbeda dengan fungsi hubungan masyarakat secara umum, sebagaimana pendapat Ruslan yang telah dikutip dalam buku Juhji, dkk yang berjudul manajemen humas pada lembaga pendidikan, yaitu menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publik.²¹

Fungsi-fungsi humas dalam kegiatan pada lembaga pendidikan antara lain:

- a. Humas sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung (komunikasi tatap muka) dan tidak langsung (melalui media pres) kepada pemimpin lembaga dan publik internal(dosen/guru, karyawan, dan mahasiswa/siswa) dan publik eksternal (masyarakat, instansi pemerintah, pras, konsumen, dll).

²⁰Wina Puspita Sari dan Asep Soegiarto, *Fungsi Dan Peran....*, hal. 52

²¹ Juhji, dkk., *Manajemen Humas....*, hal. 20

- b. Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intren dan publik ekstren, seperti: menyampaikan informasi kepada pres, dan promosi.²²

Menurut Rahmad yang dikutip dalam buku Juhji, dkk yang berjudul manajemen humas pada lembaga pendidikan, mengemukakan tujuan utama *publik relation*(Humas) adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi, memperluas prestis, menampilkan citra-citra yang mendukung. Riset menunjukkan bahwa konsumen/pelanggan lebih sering melakukan *buying decicision* atau keputusan pembalian berdasarkan citra perusahaan.²³

Menurut Sutisna tujuan hubungan masyarakat adalah:

- a. Mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran-sasaran dari sekolah.
- b. Menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi.
- c. Mempersatukan orang tua murid dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik.
- d. Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan.
- e. Membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah.

²²Wina Puspita Sari dan Asep Soegiarto, *Fungsi Dan Peran....*, hal. 53

²³ Juhji, dkk., *Manajemen Humas Pada Lembaga Pendidikan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hal. 20

- f. Memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah.
- g. Mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.²⁴

²⁴Eka Khoiru Nisa dan Danas Hasman Nugraha, *Implementasi Manajemen....*, hal. 4

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi berasal dari kata partisipasi yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan.²⁵ Menurut Keith Devis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan, partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaandi dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.²⁶

Menurut Ach. Wazir Ws partisipasi bisa diartika sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengavaluasi perubahan yang terjadi.²⁷

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan yaitu adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat

²⁵ Ahmad Hundri, *Badan Politik Uang Dalam Dokumentasi Lokal*, (Malang: Inteligensi Media, 2020), hal. 36

²⁶ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 321

²⁷ Normina, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volum 14 Nomor 26, Oktober 2016, hal. 72

untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keterlibatan aktif masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program penyelenggaraan pendidikan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi.

2. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Mengingat tidak setiap konsisi sosial budaya terbiasa dengan partisipasi sebagai salah satu bentuk dari budaya demokrasi, maka bisa saja usaha meningkatkan kualitas sebuah lembaga pendidikan dengan memanfaatkan partisipasi aktif masyarakat tidaklah selalu berjalan mulus. Sekalipun begitu peningkatan partisipasi masyarakat haruslah tetap diusahakan, sekalipun harus diakui tidak gampang. Adapun hal-hal yang dapat diusahakan, antara lain:

- a. Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan yang dilaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri.
- b. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
- c. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplementasikan.
- d. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implimentasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka, masyarakat memang

perlu diyakinkan, bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik, jika mereka berpartisipasi dalam kebijaksanaan.

- e. Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara sah dan kebijaksanaan yang sah tersebut adalah salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat.²⁸

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat:

- a. Mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi (kebersamaan dan solidaritas, tanggungjawab, kesadaran kritis, sensitif perubahan, peka terhadap lokalitas dan keberpihakan pada sekelompok marginal, dll).
- b. Menghidupkan kembali institusi-institusi *volunteer* sebagai media kewargaan yang pernah hidup dan berfungsi untuk kemudian dikontekstualisasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
- c. Memperluas ruang komunikasi publik atau semacam *public sphere* yang dapat dimanfaatkan warga untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama.²⁹

²⁸ Slameto, *Strategi Impelementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan Profesional*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiana Media, 2020), hal.87

²⁹ Abdul Rahmat, *Hubungan Sekolah...*, hal. 62

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Masyarakat harus mempunyai partisipasi aktif dalam penyalenggaraan pendidikan. Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk:

a. Partisipasi finansial

Berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orang tua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan.

b. Partisipasi materi

Diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Demikian juga masyarakat mendukung tercaiptanya lingkungan fisik yang lebih kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

c. Partisipasi akademik

Kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu banyak lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang dapat

memberikan kesempatan untuk praktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik dalam mengasah kemampuan yang dimiliki.

d. Partisipasi kultural

Perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat.

e. Partisipasi evaluatif

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah. Agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa.³⁰

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat secara umum Menurut Slemeto dan Kriswandani dapat berupa:

- a. Fasilitas yang bersifat fisik seperti tempat dan perlengkapan belajar di kelas, alat-alat pengajaran, buku-buku pelajaran, dan perlengkapan berbagai praktik, perlengkapan keterampilan, dll.
- b. Fasilitas yang bersifat non fisik seperti waktu, kesempatan biaya dan berbagai aturan serta kebijaksanaan pimpinan sekolah.

³⁰Normina, *Partisipasi Masyarakat....*, hal. 74

Menurut Slemeto dan Kriswandani, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok/bentuk, seperti berikut:

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan.

Perencanaan pendidikan adalah hal yang sangat urgen dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena dari sanalah keseluruhan dari pelaksanaan hingga kualitas dan kompetensi *output* pendidikan ditentukan. Mengingat pendidikan adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat, maka partisipasi masyarakat sangat penting. Perencanaan bisa berupa perumusan visi dan misi pendidikan. Dalam perumusan visi dan misi, masyarakat sangat penting ikut terlibat dan ikut serta untuk menemukan apa sebenarnya yang menjadi persoalan dan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Dari situ akan muncul rumusan-rumusan masalah yang nantinya akan dicari pemecahan dan solusi lewat perumusan visi dan misi pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan yang tidak diawali dengan partisipasi masyarakat dalam fase perencanaan, sama halnya dengan arogan, dengan kata lain, sekolah seperti telah benar-benar tahu terhadap apa yang dibutuhkan Manajemen Berbasis Sekolah dan diharapkan masyarakat dari sekolah, sehingga tidak perlu melibatkan masyarakat untuk merumuskan kemana sebenarnya tujuan pendidikan akan diarahkan.

b. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hal penting yang harus melibatkan masyarakat dalam pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan antara lain adalah penerimaan siswa baru, pengadaan guru, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengawasan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat dapat mengontrol penyelenggaraan pendidikan tersebut. Hal ini di satu sisi bermanfaat untuk mendorong kesungguhan penyelenggaraan pendidikan agar senantiasa profesional, dan berkualitas.

Di sisi yang lain, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan makin menebalkan rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dengan hal ini loyalitas mereka dalam mendukung keberlangsungan pendidikan diharapkan akan semakin kuat. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pendidikan akan dapat berjalan dengan efisien dan bahkan cenderung dapat menunjang kemudahan inovasi dan pengembangannya.

c. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan

Dalam pendidikan, evaluasi merupakan hal yang sangat urgen. Dari evaluasi diharapkan dapat tergambar seluruh aktifitas yang dilakukan sekolah dalam rangka menjalankan program-program. Lewat pelaksanaan evaluasi akan diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan selama program-program pendidikan berlangsung. Selanjutnya melakukan tindakan lanjut berupa

penanggulangan dan perbaikan terhadap kekurangan dan pengembangan terhadap kelebihan. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi menjadi hal penting karena mereka adalah pada dasarnya objek yang membutuhkan keberadaan pendidikan. Atas dasar kebutuhan dan semangat untuk meningkatkan taraf hidup mereka pendidikan diselenggarakan. Maka menjadi sangat naif jika masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi pendidikan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi, akan menjadi jelas apa yang kurang dan kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan dan apa yang perlu ditingkatkan. Tidak hanya dalam perspektif pengelola pendidikan namun juga dalam perspektif masyarakat sebagai *customer*.³¹

4. Manfaat Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi masyarakat, sebagaimana pendapat ahli menurut Westa manfaat partisipasi, antara lain:

- a. Dengan adanya partisipasi lebih dapat memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemikiran-pemikiran yang kreatif dan ide-ide dari masyarakat dapat dipergunakan bagi tujuan pendidikan.
- c. Partisipasi dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (human dignity), motivasi, serta membangun kepentingan bersama.

³¹Abdul Rahmat, *Manajemen Humas....*, hal. 145-146

- d. Partisipasi dapat mendorong seseorang untuk memiliki jiwa bertanggungjawab.
- e. Memperbaiki semangat bekerjasama serta menimbulkan kesatuan kerja yang efektif.
- f. Lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan.³²

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sekolah tentunya dapat memberikan manfaat yang besar bagi lembaga pendidikan. Adapun manfaat partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Partisipasi mewujudkan kedaulatan rakyat, yang menempatkan masyarakat sebagai awal dan tujuan pembangunan.
- b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi adalah proses saling belajar dan bertukar pikiran bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga bisa saling menghargai, mempercayai, dan menumbuhkan sikap yang arif.
- d. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat.
- e. Partisipasi merupakan kunci dalam pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

³² Rizal Andreeyan, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan pembangunan di kelurahan Sambutan kecamatan Sambutan Kora Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara, 2014, 2 (4), hal. 1941

- f. Partisipasi merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan tujuan pendidikan.
- g. Partisipasi dapat mencegah timbulnya pertentangan, konflik, dan sikap-sikap *waton suloyo*.
- h. Partisipasi dapat membangunkan rasa masyarakat memiliki dan terlibat terhadap agenda pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
- i. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan demokrasi.³³

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sudah mengkaji dan melakukan penelitian mengenai manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingsih Dwi Putri, yang berjudul “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru”. Skripsi pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Administrasi Pendidikan UIN SUSKA Riau Pekanbaru tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru dapat membangun citra sekolah dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru.

³³ Abdul Rahmat, *Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Mengelola Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Sekolah*, (Yogyakarta: Zahir Publisng, 2020), hal. 60

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hadijah yang berjudul “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampit Kota Waringin Timur”. Tesis pada Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan perencanaan dan pelaksanaan, program hubungan masyarakat di SMPN 1 Sampit dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sertamendiskripsikanpengendalianprogram hubungan masyarakat di SMPN 1 Sampit dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Darma, yang berjudul “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di MAN 1 Medan”. Skripsi pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pentingnya peranan humas dalam lembaga pendidikan, dan tahapan-tahapan manajemen humas dalam membangun partisipasi masyarakat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rozanah Alham Fadiyah, yang berjudul “Peran Humas Dalam Membangun Citra Positif sekolah Di SDN Sosrowijayan Yogyakarta”. Skripsi pada program studi Manajemen Pendidikan Islam jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pentingnya peran humas dan pendidikan di sekolah

dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah serta membangun nama baik sekolah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawati, yang berjudul “Strategi Manajemen Humas Dalam Membangun Citra Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang”. Skripsi pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Medan tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya citra lembaga agar masyarakat memberikan apresiasi sekaligus reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kurnianingsih Dwi Putri, tahun 2021, dengan judul “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru”.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan dari manajemen humas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru dapat membangun citra positif sekolah. Faktor keberhasilan dari manajemen humas dalam	Penelitian ini fokus pada pelaksanaan manajemen humas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Penelitian ini lebih mengkaji pada upaya-upaya humas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengkaji faktor keberhasilan serta hambatan dari program humas.

		meningkatkan partisipasi masyarakat di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu pekanbaru adalah ketersediaan fasilitas dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, adapun faktor penghambat pelaksanaan program humas adalah belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan belum tentu aktif di media sosial.	Dalam penelitian ini untuk pengecekan keabsahan data menggunakan empat kriteria sebagai acuan yaitu kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian.	
2	Siti Hadijah, tahun 2019, dengan judul “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampit Kota Waringin Timur”.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bidang kehumasan dalam perencanaan program humas sudah dilaksanakan dengan baik namun juga ada beberapa perencanaan yang belum maksimal. Dalam proses pelaksanaan program Humas melibatkan kepada sekoldah dan mengikutsertakan personil sekolah dalam memonitoring dan mengontrol pelaksanaan	Penelitian ini mengacu kepada fungsi manajemen POAC. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dengan sumber data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. keabsahan data dalam penelitian ini berdasarkan pada empat kriteria yaitu	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada proses penyimpulan secara deduktif dan induktif. Pemeriksaan

		<p>program Humas. Dalam tahap evaluasi pelaksanaan program Humas diberikan kepada kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi pada rapat kerja akhir semester dan akhir tahun pelajaran, hasil dari evaluasi merumuskan berbagai langkah perbaikan program kerja Humas selanjutnya.</p>	<p>keterpercayaan, transfereabilitas, dependibilitas, dan komfirmabilitas atau objektifitas.</p>	
3	<p>Adi Darma, tahun 2019, dengan judul “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di MAN 1 Medan”.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bidang kehumasan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan strategi program humas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MAN 1 Medan sudah cukup baik. Namun ada beberapa permasalahan ditemukan oleh peneliti, salah satunya kurangnya koordinasi antara public internal dan eksternal dalam pelaksanaan program humas.</p>	<p>Penelitian ini mengacu kepada fungsi manajemen POAC. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dengan sumber data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini untuk pengecekan keabsahan data menggunakan empat kriteria sebagai acuan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan fokus penelitian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan strategi program humas dalam membangun partisipasi masyarakat.</p>

			yaitu kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian.	
4	Rozanah Alham Fadiyah, tahun 216, dengan judul “Peran Humas Dalam Membangun Citra Positif sekolah Di SDN Sosrowijayan Yogyakarta”.	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran humas dalam membangun citra positif sangat tinggi. Memiliki kerjasama yang baik dengan pihak internal dan eksternal, dan saling terjaganya komunikasi yang baik serta terjalannya koordinasi yang baik dengan kepala sekolah, guru, komite dan unsur-unsur yang terlibat.</p> <p>Demikian merupakan usaha humas SDN Sosrowijayan Yogyakarta selalu berusaha melakukan hal-hal yang positif demi terbentuknya citra positif sekolah.</p> <p>Namun ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam membangun citra positif sekolah di SDN Sosrowijayan Yogyakarta diantaranya hambatan berupa</p>	<p>Penelitian ini mengarah kepada objek hubungan sekolah dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode dan teknik penelitian kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini mengangkat permasalahan yang ada di lokasi ini untuk dijadikan rumusan masalah, diantaranya peranan, hambatan-hambatan, dan upaya-upaya humas dalam membangun citra positif sekolah di SDN Sosrowijayan Yogyakarta”.</p> <p>Penelitian ini tidak mengacu kepada fungsi manajemen POAC.</p> <p>Dalam penelitian ini hanya mencantumkan sumber data primer.</p> <p>Dalam teknik keabsahan data hanya menggunakan triangulasi sumber dan teknik.</p>

		keuangan, waktu, peran orang tua, lingkungan letak sekolah, kurangnya SDM disekolah, buku piket dan lainnya.		
5	Hermawati, tahun 2017, dengan judul “Strategi Manajemen Humas Dalam Membangun Citra Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang”.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kopetensi seorang manajer humas sangat mempengaruhi keberhasilan program kehumasan. Dalam membangun citra madrasah langkah-langkah/strategi-strategi yang dilakukanmanajer humas, diantaranya memahami keadaan internal dan eksternal madrasah dengan mengidentifikasi kelemahan maupun kekuatan madrasah, memperbaiki kondisi fisik maupun nonfisik madrasah, dan mengenalkan madrasah kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lainnya.	Penelitian ini mengarah kepada objek hubungan sekolah dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pencermatan keabsahan data yaitu krebilitas, keteralihan. Dapat dipercaya, dan dapat dikomfirmasikan.	Penelitian ini mengarah kepada fokus penelitian strategi, faktor pendukung dan penghambat, serta keberhasilan manajer Humas membangun citra madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Teknik analisis data dalam penelitian ini diantaranya analisi pad tingkat awal, analisis data pada saat pengumpulan data, analisis data akhir, reduksi data, penyajian data, kesimpulan.

Penelitian skripsi yang berjudul “**Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di SMKN 1 Bandung Tulungagung**” menggunakan objek manajemen hubungan masyarakat dan mengangkat potensi-potensi yang ada dilokasi untuk dijadikan fokus penelitian dengan menggunakan fokus POAC yaitu perencanaan manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMKN 1 Bandung Tulungagung, pelaksanaan manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMKN 1 Bandung Tulungagung, dan evaluasi manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMKN 1 Bandung Tulungagung. Jadi dalam penelitian ini memfokuskan kearah bagaimana manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

D. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah acuan yang menjadi dasar bagi setiap penelitian untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti. Pemilihan paradigma dalam riset memiliki implikasi terhadap pemilihan metodologi dan metode pengumpulan dan analisis data.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada manajemen hubungan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi terkait keikutsertaan atau partisipasi masyarakat. Adapun gambarannya penelitian ini, sebagai berikut

Gambar 2.2

Paradigma Penelitian



Paradigma dalam penelitian ini adalah manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa manajemen humas meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ini dilakukan secara profesional, sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Manajemen humas ini dijadikan sebagai langkah dalam menjalin hubungan harmonis kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan eksistensi lembaga pendidikan.